



## Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

Putri Faraz Oktavi Yanti<sup>1</sup>, Suhono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 17 November 2023

Revised: 15 Desember 2023

Accepted: 17 Januari 2024

*The point of this study is to ascertain and examine the effect of Land and Building Tax and Acquisition Duty of Right on Land and Building both partially and simultaneously on DKI Jakarta's Original Local Government Revenue in 2017 – 2022. The population of this study includes data recapitulation targets and PBB-P2 and BPHTB revenues in 2017 – 2022. Through the use of purposive sampling, the sample was selected. Associative quantitative is the method of data analysis used in this study. t and f tests for testing hypotheses. The outcomes of this study show that BPHTB (X1) has a significant positive effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.)  $0.011 < 0.05$ . PBB-P2 (X2) has a negative significant effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.)  $0.019 < 0.05$ . BPHTB (X1) and PBB-P2 (X2) have a simultaneous effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.)  $0.032 < 0.05$ .*

**Keywords:** *Land and Building Tax, Acquisition Duty of Right on Land and Building, Original Local Government Revenue.*

(\*) Corresponding Author: [1910631030124@student.unsika.ac.id](mailto:1910631030124@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Yanti, P. F. O., & Suhono, S. (2024). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10544683>.

---

### PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah, dimana biasa disebut desentralisasi atau praktik pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengawasi anggaran daerah. Kebijakan tersebut mendorong kemampuan setiap daerah untuk mampu menggali pendanaan dan potensi yang ada untuk membiayai pembangunannya sendiri.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada realisasi pelaksanaan otonomi daerah diharapkan menjadi fondasi penting pada pembiayaan aktivitas pembangunan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah mengupayakan penghasilan yang bersumber atas daerah otonomnya agar meningkatkan adanya pembiayaan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Sehingga pemerintah di daerah wajib mencari tau bidang potensial yang menjadi penggerak pembangunan daerah untuk memajukan jumlah penerimaan asli secara lokal.

Mengoptimalkan sumber-sumber perolehan atas Pendapatan Asli Daerah menjadi sungguh esensial untuk dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah, yakni dengan pajak daerah dan juga Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain itu yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan

perpajakan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan keuangan daerah adalah pentingnya pengetahuan masyarakat.

Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberi adanya dugaan PBB dan BPHTB berpengaruh atas PAD. PBB dan BPHTB dihitung pada basis pajak daerah yang diselenggarakan di DKI Jakarta yang menggambarkan asal penghasilan daerah yang baik dan memadai dengan mempersempit sumbangan penerimaannya atas PAD. Oleh karena itu pemerintah harus berbenah. PBB yakni pajak yang didapat sehubungan dengan adanya lahan dan gedung yang menguntungkan individu, badan, atau kedua-duanya, sedangkan BPHTB yakni pajak yang didapat sehubungan pada perolehan kepemilikan atas lahan dan/atau gedung, khususnya atas aktivitas hukum atau perihal yang menghasilkan terjadinya pembelian kepemilikan atas lahan atau gedung oleh individu atau badan. Dengan data yang peneliti peroleh dari Bapenda DKI Jakarta, Target dan Realisasi BPHTB dan PBB-P2 yaitu;

Data Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 DKI Jakarta

NO	TAHUN	BPHTB		PBB-P2	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2017	5.579.500.000.000	6.768.138.139.169	8.000.000.000.000	7.607.315.017.008
2	2018	8.039.599.000.000	6.335.596.442.107	8.500.000.000.000	8.903.330.671.892
3	2019	9.500.000.000.000	5.728.131.187.296	10.000.000.000.000	9.654.310.420.963
4	2020	5.000.000.000.000	4.681.442.315.680	9.450.000.000.000	8.972.478.977.120
5	2021	6.920.000.000.000	5.511.563.659.515	10.250.000.000.000	8.432.360.393.070
6	2022	7.570.000.000.000	6.353.866.059.761	10.250.000.000.000	8.253.701.449.031

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2023. Diolah Peneliti.

Merujuk pada Bahan Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 DKI Jakarta diatas menunjukkan bahwa data penerimaan BPHTB maupun PBB-P2 disetiap tahunnya selalu tidak melampaui target yang telah ditentukan. Untuk penerimaan BPHTB yang melampaui sasaran hanya dalam tahun 2017 dan untuk penerimaan PBB-P2 yang melampaui sasaran hanya di tahun 2018.

Berdasarkan temuan terdahulu sebelumnya yang dilakukan Pamungkas (2018), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) X1 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) X2 berpengaruh simultan atas PAD kota Yogyakarta. Secara parsial Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap PAD Yogyakarta tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif atas PAD Yogyakarta.

Berdasarkan temuan terdahulu sebelumnya yang dilakukan Nurafifah dan Irawan (2020), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan dan positif baik secara parsial maupun simultan atas PAD di kota Bandung.

Berdasarkan temuan terdahulu sebelumnya yang dilakukan Arifiana, et al. (2020), mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Malang dan Pajak Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif atas PAD Kabupaten Malang.

Berdasarkan data, teori, dan temuan terdahulu di atas peneliti ingin meneliti “ Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 ” untuk melihat adakah pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Beragam definisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberikan oleh Mardiasmo (2018), antara lain:

1. Atas pembelian kepemilikan atas lahan dan/atau gedung dipungut pajak yang disebut dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang sesudah itu BPHTB merupakan Pajak.
2. Aktivitas atau kejadian hukum yang mengakibatkan terjadinya pembelian kepemilikan atas lahan dan/atau gedung oleh seseorang atau suatu badan dapat dinyatakan dengan perolehan kepemilikan atas lahan dan/atau gedung.
3. Merujuk peraturan perundang-undangan sektor lahan dan gedung, kepemilikan atas lahan dan/atau gedung adalah kepemilikan atas tanah, yang dihitung kepemilikan pengelolaan, dan gedung yang di tempatnya.

## **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Istilah "Bumi" mengacu atas bidang dunia, yang tersebut didalamnya lautan samudra dan lautan daerah terpencil. Struktur teknik yang dikenal sebagai bangunan didirikan di atas atau secara permanen ditempelkan ke tanah, saluran air pedalaman, atau laut. “Menyadari bahwa bumi tersusun atas permukaannya dari badan bumi yang berada di dalamnya, menurut Mardiasmo. Bidang bumi terdiri atas daratan, lautan daerah terpencil (seperti rawa, telaga, dan perairan), serta laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bangunan gedung yaitu struktur teknis yang didirikan di atas tanah atau ditempelkan secara permanen pada bangunan atau tanah lain. Selain itu, jalan lingkungan yang juga merupakan himpunan gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, arena olahraga, kumpulan kapal, dermaga, taman populer, shelter, jaringan pipa udara dan gas, serta fasilitas bermanfaat lainnya semuanya termasuk dalam pengertian bangunan.

Kecuali area yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan beberapa sektor komersial lainnya, yang masih dikenakan pungutan pemerintah pusat, PBB-P2 pajak yaitu terhadap lahan dan/atau gedung yang dipunyai, dikuasai, dan/atau dioperasikan oleh individu atau perusahaan.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Makna dan tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang dihasilkan secara lokal memintasi sumber-sumber seperti pengelolaan aset, pajak, dan retribusi. Pengembangan efisiensi pemotongan, peningkatan dan perluasan jenis pungutan, pajak daerah, dan sumber penghasilan lainnya adalah semua cara untuk menyediakan pembiayaan dari pendapatan asli daerah. Akibatnya,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber pendanaan dan tolak ukur.

Menurut Mardiasmo (2019), “Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan atas sumber di bidang pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan kepemilikan daerah, hasil penyelenggaraan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah”

### HIPOTESIS PENELITIAN

Merujuk pada masalah di studi ini dapat menyatakan di penelitian ini didapati hipotesis sebagai berikut;

1.  $H_1$  : Dugaan adanya Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap PAD DKI Jakarta
2.  $H_2$  : Dugaan adanya Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD DKI Jakarta
3.  $H_3$  : Dugaan adanya Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD DKI Jakarta

### METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai pada studi ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk memahami, memprediksi, dan mengelola fenomena yang diinginkan, penelitian kuantitatif mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka (numerik). Analisis data numerik yang telah diolah dengan teknik statistik ditekankan pada penelitian kuantitatif. Data sekunder digunakan sebagai bahan penelitian pada studi ini. Populasi atas studi ini yaitu data penerimaan target dan realisasi BPHTB dan PBB-P2 DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2022. Pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu dengan menggunakan pendekatan purposive sampel. Teknik analisis bahan yang dipakai yaitu uji prasyarat asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas). Setelahnya menggunakan uji analisis persamaan regresi linear berganda, uji determinasi dan uji hipotesis (uji t, dan uji f). Berikut uraian kerangka teori penelitian:



Sumber: Data diolah penulis, 2023

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik bermaksud untuk menjadi syarat kondisi yang wajib dituntaskan sebelum mengevaluasi hipotesis. Pada penelitian ini hipotesis diuji dengan memanfaatkan analisis regresi linier berganda dimana anggapan yang wajib dipenuhi adalah data wajib berdistribusi normal dan terbebas atas masalah multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

**Uji Normalitas**

Maksud uji normalitas yaitu agar memahami apakah variabel residual atau perancu pada model regresi berdistribusi normal.

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0020833
	Std. Deviation	3.31655E+12
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.111
	Negative	-.136
Test Statistic		.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Bersumberkan pada interpretasi uji normalitas adalah apabila angka berdistribusi dengan normal yaitu angka signifikansi > 0,05 dan kebalikannya jika angka signifikansi < 0,05 dinyatakan angka tidak berdistribusi dengan normal. Berlandaskan dengan output peneliti di atas menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test didapati angka asymp. sig sejumlah 0,161 yaitu angka signifikansinya melampaui syarat uji normalitas yang nilai signifikansinya > 0,05 menyatakan bahwa angka keterangan terdistribusi normal dan sanggup memberikan kesimpulan bahan data pada sampel yang dipakai peneliti pada studi ini layak untuk dipakai.

**Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah agar memahami apakah variabel independen dan independen dalam acuan regresi berkorelasi. Tidak diperkenankan adanya korelasi antar variabel independen dalam acuan regresi yang layak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.359E+13	1.744E+12		36.455	.000		
	BPHTB	4.944	1.807	.722	2.737	.011	.412	2.428
	PBB-P2	-3.646	1.466	-.657	-2.488	.019	.412	2.428

a. Dependent Variable: PAD DKI JAKARTA

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Berlandaskan output Uji Multikolinearitas diatas peneliti mengetahui yaitu segenap variabel independen pada studi ini didapati angka tolerance 0.412 > 0.10

dan VIF  $2.428 < 10.00$  , sehingga dapat diambil pernyataan yaitu data atas studi ini bebas dari gejala multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada model regresi linier menguji apakah terdapat variansi yang tidak sama pada seluruh data. Tes Glesjer dapat digunakan dalam penelitian ini. Regresi residu absolut digunakan untuk menilai adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dengan menggunakan uji hipotesis yang disebut dengan uji Glejser.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.800E+12	1.121E+12		2.498	.019
	BPHTB	-2.258	1.161	-.546	-1.945	.062
	PBB-P2	1.222	.942	.364	1.298	.205

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Berlandaskan output pada uji heteroskedastisitas di tabel coefficients berikut yang peneliti uji dengan uji glesjer yaitu tampak bahwa angka signifikansi variabel PBB sebesar  $0,205 > 0,05$  dimana nilai tsb  $> 0,05$  dan angka signifikansi variabel BPHTB sebesar  $0,062 > 0,05$  yang didapati menyatakan pernyataan yaitu data penelitian tidak menggambarkan adanya gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelas bertujuan yaitu mendapati ada atau tidaknya masalah asumsi klasik autokorelasi. Hasil output uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.418 <sup>a</sup>	.175	.112	2.11190E+12	1.642

a. Predictors: (Constant), LAG\_X2, LAG\_X1  
b. Dependent Variable: LAG\_Y

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Merujuk pada pengujian autokorelasi didapati nilai Durbin Watson yaitu sama dengan 1,642. Penelitian ini memerlukan tahap signifikan 5% nilai DU adalah 1,567 berikutnya hasil dari  $(4 - DU = 4 - 1,642 = 2,433)$  . Ketentuan tiadanya gejala autokorelasi adalah  $DU < DW < 4 - DU$  maka dari itu dengan angka  $1,567 < 1,642 < 2,433$  oleh karena itu dapat memberikan simpulkan yaitu tiadanya gejala autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Agar dapat mengidentifikasi kaitan fungsional kira kira di dua atau lebih faktor independen bersama variabel dependen, atau untuk meramalkan dua atau lebih variabel independen atas variabel dependen, uji hipotesis dalam studi ini digunakan regresi berganda yang akan diuji secara empiris. Tabel berikut menggambarkan hasil dari uji linier yang digunakan pada studi ini;

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.359E+13	1.744E+12		36.455	.000	
	BPHTB	4.944	1.807	.722	2.737	.011	.412
	PBB-P2	-3.646	1.466	-.657	-2.488	.019	.412

a. Dependent Variable: PAD DKI JAKARTA

Sumber.: Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Berlandaskan luaran hasil analisis regresi berganda diatas, sehingga didapati persamaan regresi dengan interpretasinya:

$$Y = 63.590.000.000.000 + 4,944 X1 - 3,646 X2$$

1. Nilai konstanta persamaan regresi sebesar 63.590.000.000.000 menggambarkan bahwa jika tidak ada PBB dan BPHTB maka PAD DKI Jakarta sebesar 63.590.000.000.000.
2. Berlandaskan persamaan koefisien regresi menggambarkan bahwa variabel BPHTB (X1) memiliki arah regresi positif atas PAD DKI Jakarta ialah sebesar 4,944 yang menyatakan yaitu setiap kenaikan satu satuan BPHTB akan meningkatkan PAD DKI Jakarta sebesar 4,944 satuan dengan anggapan bahwa X2 tetap.
3. Berlandaskan persamaan koefisien regresi menggambarkan bahwa variabel PBB (X2) memiliki arah regresi negatif atas PAD DKI Jakarta ialah sebesar -3,646 yang menyatakan yaitu setiap kenaikan satu satuan PBB akan menurunkan PAD DKI Jakarta sebesar 3,646 satuan dengan anggapan bahwa X1 tetap.

#### Analisis Koefisien Determinasi

Dalam model regresi penelitian, koefisien determinasi (R Square) berupaya untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas / independen terhadap variabel terikat / dependen. Berikut hasil penelitian uji koefisien determinasi.;

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 <sup>a</sup>	.225	.168	3.437E+12	.478

a. Predictors: (Constant), PBB-P2, BPHTB  
b. Dependent Variable: PAD DKI JAKARTA

Sumber.: Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Bersumber tabel luaran SPSS *Model Summary* diatas, didapati nilai koefisien determinasi / *R Square* ialah sebesar 0,225 atau sama dengan 22,5%. Presentase tersebut memuat pernyataan bahwa variabel BPHTB (X1) dan PBB-P2 (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel PAD DKI Jakarta (Y) sebesar 22,5%. Sedangkan sebagian lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diperhatikan atau dimasukkan dalam persamaan regresi..

#### Uji t

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk mengukur sejauh mana setiap variabel independen dalam suatu penelitian mempunyai dampak terhadap variabel dependen. Nilai Sig dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil saat melakukan uji t parsial. Tingkat signifikansi penelitian ini adalah 5% atau 0,05.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.359E+13	1.744E+12		36.455	.000		
	BPHTB	4.944	1.807	.722	2.737	.011	.412	2.428
	PBB-P2	-3.646	1.466	-.657	-2.488	.019	.412	2.428

a. Dependent Variable: PAD DKI JAKARTA

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Apabila angka signifikansi uji  $t > 0,05$  dan angka  $t$  hitung  $< t$  tabel dinyatakan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial. Apabila angka signifikansi uji  $t < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya terdapat pengaruh secara parsial.

Pengaruh BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD DKI Jakarta secara parsial yaitu;

Hasil uji  $t$  BPHTB yang terdapat di atas menandakan angka signifikansinya adalah  $0,011 < 0,050$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BPHTB terdapat pengaruh secara parsial terhadap PAD DKI Jakarta. Hasil tersebut bisa dilihat dari perbandingan angka  $t$  hitung yang lebih besar angkanya dibandingkan angka  $t$  tabel ( $t$  hitung  $> t$  tabel =  $2,737 > 2,052$ ). Hal ini bisa menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan BPHTB mempunyai pengaruh terhadap PAD DKI, dinyatakan **diterima**.

Hasil uji  $t$  PBB-P2 yang terdapat di atas menandakan angka signifikansinya adalah  $0,019 < 0,050$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 terdapat pengaruh secara parsial terhadap PAD DKI Jakarta. Hasil tersebut bisa dilihat dari perbandingan angka  $t$  hitung yang lebih besar nilainya dibandingkan angka  $t$  tabel ( $t$  hitung  $> t$  tabel =  $2,488 > 2,052$ ). Hal ini bisa menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan PBB-P2 mempunyai pengaruh terhadap PAD DKI, dinyatakan **diterima**.

### Uji f

Dalam penelitian ini, uji  $f$  dipakai agar dapat mendeteksi apakah suatu variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau kumulatif terhadap variabel dependen.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.283E+25	2	4.641E+25	3.929	.032 <sup>b</sup>
	Residual	3.190E+26	27	1.181E+25		
	Total	4.118E+26	29			

a. Dependent Variable: PAD DKI JAKARTA

Sumber : Hasil Output SPSS 25, Data diolah peneliti.

Berlandaskan tabel luaran SPSS “Anova” diatas diketahui nilai Signifikansi (Sig) ialah  $0,032 < 0,05$  dan  $f$  hitung  $> f$  tabel yaitu  $3,929 > 3,34$  maka dapat menyimpulkan bahwa hipotesis  $H_3$  diterima yaitu dengan kesimpulan bahwa semua variabel independen BPHTB ( $X_1$ ) dan PBB-P2 ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen PAD DKi Jakarta ( $Y$ ).

### KESIMPULAN

Bersumber pada hasil analisis data dan pembahasan, peneliti mendapati kesimpulan yang peneliti ambil dari penelitian mengenai Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X1) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).
2. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X2) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).
3. Variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X1) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X2) keduanya berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiana, D. R., Rifa'I, M. N., Hakim, A. L., & Ainulyaqin, M. H. (2020) *Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* (149-160).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan* <https://bprd.jakarta.go.id>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019) *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020) *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung*. *Indonesian Accounting Research Journal* (190-199). Politeknik Negeri Bandung.
- Pamungkas, S. (2018). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ekobis Dewantara* (46-56). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta